

**LAPORAN TUGAS AKHIR
PROSEDUR PENGAJUAN PERUBAHAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN(PBB P-2)
DI BADAN KEUANGANKABUPATEN NGAWI**



Disusun Oleh :

DEVI MARETA LISTYANINGSIH

D1515027

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya(A.Md.) Dalam Bidang Manajemen Administrasi

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN ADMINITRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2018**

PERSETUJUAN

**PROSEDUR PENGAJUAN PERUBAHAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB P-2) DI BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI**

Disusun Oleh :

DEVI MARETA LISTYANINGSIH

D1515027

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 26 Maret 2018

Pembimbing,



DJOKO PURWOKO, S.S., M.H.

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diuji dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari : Senin

Tanggal : 26 Maret 2018

Disusun Oleh :

Devi Mareta Listyaningsih

D1515027

Panitia Ujian Tugas Akhir

Nama

Tanda tangan

1. Penguji 1

Irsyadul Ibad, S.AB, M.Ed, M.Si

2. Penguji 2

Djoko Purwoko, S.S., M.H



Mengetahui,

Dekan,

Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si

NIP. 196108251986012001

PERNYATAAN

Nama : Devi Mareta Listyaningsih

N I M : D1515027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul “Prosedur Pengajuan Perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) Di Badan Keuangan Kabupaten Ngawi ” adalah betul-betul karya sendiri. hal-hal yang bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang saya peroleh dari tugas akhir tersebut.

Surakarta, 26 Maret 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Devi Mareta Listyaningsih

MOTTO

Memayu Hayuning Bawono
(PSHT 1922)

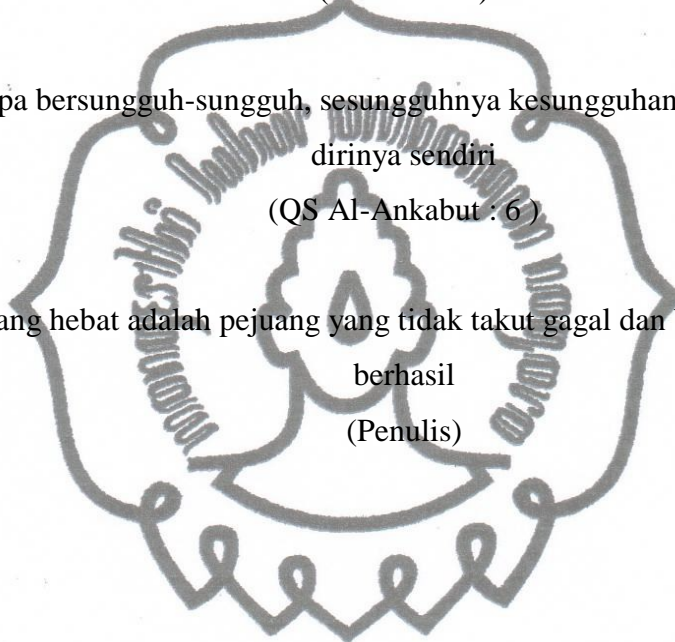
Berani Karena Benar, Takut Karena Salah
(PSHT 1922)

Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk
dirinya sendiri

(QS Al-Ankabut : 6)

Pejuang yang hebat adalah pejuang yang tidak takut gagal dan berani bangkit untuk
berhasil

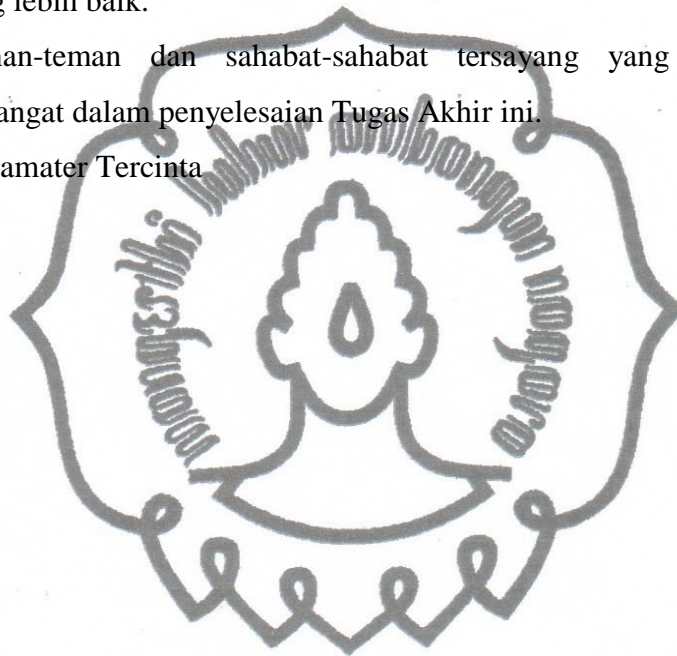
(Penulis)



PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang selalu ada dan selalu membimbing langkah penulis.
2. Bapak dan Ibu tercinta yang tak terhingga pengorbanan dan kasih sayangnya.
3. Seseorang yang selalu memotivasi dan memberikan dorongan untuk hidup yang lebih baik.
4. Teman-teman dan sahabat-sahabat tersayang yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Almamater Tercinta



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Prosedur Pengajuan Perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Badan Keuangan Kabupaten Ngawi. Penulis menyusun Tugas Akhir ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam mengerjakan Tugas Akhir ini banyak kesulitan yang penulis hadapi, namun berkat arahan dan bantuan berbagai pihak akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini antara lain kepada :

1. Bapak Djoko Purwoko, S.S.,M.Hselaku Pembimbing dalam penulisan Tugas Akhir ini yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan saran dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Irsyadul Ibad, S.AB, M.Ed, M.Si selaku penguji Tugas Akhir ini yang memberikan pengarahan dan saran dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Drs. Ali, M.Si. selaku Ketua Prodi Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Dosen dan Karyawan Program Studi D III Manajemen Administrasi Fisip Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penyelesaian laporan ini.
5. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak Agus Setyo Budi, selaku Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di kantor Badan Keuangan Kabupaten Ngawi yang senantiasa memberikan bimbingan.

7. Segenap pegawai di Badan Keuangan Kabupaten Ngawi yang selalu membantu penulis dalam memberikan petunjuk-petunjuk dalam melakukan kegiatan magang.
8. Bapak, Ibu tersayang yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Keluarga besar yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan tugas Akhir ini.
10. Seseorang, teman dan Sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat dan bantuan pada saat mengerjakan tugas akhir ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penulisan laporan ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini masih belum sempurna. oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, Maret 2018

Penulis,

Devi Mareta Listyaningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Pengamatan	4
D. Manfaat Pengamatan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Pustaka	6
1. Pengertian Prosedur	6
2. Pengertian Pengajuan	16
3. Pengertian Perubahan	16
4. Pengertian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)	16
5. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2)	18
6. Prosedur Pengajuan Perubahan Surat Pemberitahuan Pajak	

Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2)	20
B. Metode Pengamatan	22
1. Lokasi Pengamatan	22
2. Jenis Pengamatan	22
3. Teknik Pengumpulan Data	23
BAB III DESKRIPSI INSTANSI	28
A. Profil Instansi	28
B. Logo	28
C. Sejarah Instansi	31
D. Visi Dan Misi	32
E. Struktur Organisasi	36
F. Tugas Pokok dan Fungsi	38
G. Perekrutan Pegawai	52
H. Penggajian	54
I. Jam Kerja	54
J. Tata Kelola Kantor	55
K. Fakta Integritas	56
L. Pengawasan Melekat	57
M. Tanggung Jawab Sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	57
BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMAHASAN	59
A. Prosedur	59
B. Pengajuan	60
C. Perubahan	60
D. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)	60
E. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2)	64
F. Prosedur Pengajuan Perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di Badan Keuangan Kabupaten Ngawi	67
1. Prosedur Pengajuan Perubahan Pembetulan	67

2. Prosedur Pengajuan Perubahan Mutasi	82
3. Prosedur Pengajuan Perubahan Pengurangan	89
4. Prosedur Pengajuan Perubahan Keberatan.....	97
5. Prosedur Pengajuan Perubahan Pembatalan.....	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
Daftar Pustaka	115
Lampiran-lampiran	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Golongan dan Jumlah Pegawai di Badan Keuangan
Kabupaten Ngawi 53

Tabel 3.2: Jam Kerja di Badan Keuangan Kabupaten Ngawi..... 54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Diagram batang data pengajuan perubahan SPPT PBB P-2 tahun 2015-2017	3
Gambar 3.1 : Lambang Kabupaten Ngawi.....	28
Gambar 3.2 : Artikulasi Warna Dan Gambar Lambang Kabupaten Ngawi	29
Gambar 3.3: Struktur Organisasi Badan Keuangan Kabupaten Ngawi	36
Gambar 4.1 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tampak depan.....	61
Gambar 4.2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tampak belakang.....	63
Gambar 4.3 : <i>Flowchart</i> Prosedur Pengajuan Perubahan Pembatalan.....	67
Gambar 4.4: Formulir SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak)	69
Gambar 4.5 : Lembar pertama formulir LSOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak) tampak depan	70
Gambar 4.6: Lembar pertama formulir LSOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak) tampak belakang	71
Gambar 4.7: lembar kedua Formulir LSOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak)	72
Gambar 4.8: Formulir surat permohonan pembetulan	73
Gambar 4.9: Contoh surat pengantar dari desa	74
Gambar 4.10: Formulir pengajuan pembetulan secara kolektif	75
Gambar 4.11: Formulir pendaftaran pengajuan	79
Gambar 4.12 : <i>Flowchart</i> Prosedur Pengajuan Perubahan Mutasi	82
Gambar 4.13: Formulir permohonan mutasi.....	84
Gambar 4.14: Formulir pengajuan mutasi secara kolektif	85
Gambar 4.15: <i>Flowchart</i> Prosedur Pengajuan Perubahan Pengurangan	89
Gambar 4.16: Formulir permohonan pengurangan.....	91
Gambar 4.17: Formulir pengajuan pengurangan secara kolektif.....	92
Gambar 4.18: <i>Flowchart</i> Prosedur Pengajuan Perubahan Keberatan.....	97
Gambar 4.19: Formulir permohonan keberatan	99
Gambar 4.20 : Formulir pengajuan keberatan secara kolektif.....	100

Gambar 4.21: *Flowchart* Prosedur Pengajuan Perubahan Pembedaan 105
Gambar 4.22 : Formulir permohonan Pembedaan 108
Gambar 4.23 : Formulir pengajuan pembedaan secara kolektif 109



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P-2 tampak depan
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P-2 tampak belakang
3. Daftar Pertanyaan Wawancara
4. Struktur Organisasi Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
5. Daftar Gaji PNS berdasarkan masa kerja
6. Contoh Surat Pengantar dari Desa
7. Formulir Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP)
8. Formulir Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP)
9. Formulir Permohonan Pengurangan
10. Formulir Permohonan Pembetulan
11. Formulir Permohonan Pembatalan
12. Formulir Permohonan Mutasi
13. Formulir Permohonan Keberatan
14. Formulir pendaftaran pengajuan perubahan SPPT PBB P-2 yang telah diverifikasi.
15. Formulir pendaftaran pengajuan perubahan SPPT PBB P-2 yang diberikan ke pemohon.
16. Perjanjian Kinerja di Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.
17. Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9.3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2.10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
19. Surat Tugas Magang.
20. Surat Keterangan selesai Magang.
21. Form Monitoring.
22. Form Nilai Magang.

Abstrak

Devi Mareta Listyaningsih, D1515027, Prosedur Pengajuan Perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, Program Studi Manajemen Administrasi, Program Diploma III, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai warga negara yang baik kita wajib membayar pajak setiap tahunnya. Untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dibutuhkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk memberitahukan kepada wajib pajak besarnya tagihan pajak yang terutang. SPPT merupakan surat yang dapat di ubah karena beberapa hal seperti kesalahan identitas, mutasi, keberatan, pengurangan, maupun pembatalan. Dalam hal ini masih banyak masyarakat kota Ngawi yang belum mengetahui secara pasti bagaimana merubah SPPT yang benar. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pengajuan Perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak dan digunakan wajib pajak untuk membayar pajak terutang. Setiap wajib pajak yang mempunyai tanah dan bangunan hanya diberikan 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang. Dalam melakukan pengamatan penulis mengambil lokasi di Badan Keuangan Kabupaten Ngawi. Jenis pengamatan deskriptif kualitatif dengan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dan menggunakan observasi berperan aktif. Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen dan arsip.

Dalam laporan ini penulis menjelaskan tentang bagaimana Prosedur Pengajuan Perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan apa saja persyaratan yang dibutuhkan dalam setiap pengajuan perubahan sesuai dengan jenis pengajuan.

Dari pengamatan penulis Prosedur Pengajuan Perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di Badan Keuangan Kabupaten Ngawi telah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan *Standart Operating Prosedure* (SOP) yang ada di Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.

Kata Kunci : Prosedur, Perubahan SPPT, PBB P-2